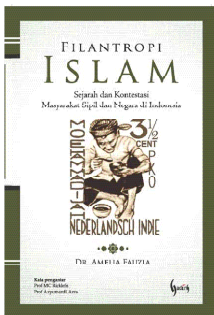


# Resensi Buku: Jejak Gerakan Berderma di Indonesia

Hamid Abdullah Rahmad

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,  
Universiti Sains Islam Malaysia  
E-mail: [hamidabd@gmail.com](mailto:hamidabd@gmail.com)



Judul Buku : *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*  
Penulis : Dr. Amelia Fauzia  
Penerbit : Gading, Yogyakarta  
Cetakan : I, Mei 2016  
Tebal : +375 Halaman  
ISBN : 978-602-0809-250

Indonesia merupakan bangsa yang ramah, baik hati dan suka berderma. Begitulah paradigma yang selama ini berkembang. Perilaku etis yang tertanam begitu dalam dalam pribadi bangsa Indonesia, merupakan ajaran nenek moyang yang secara turun-temurun dilestarikan hingga kini. Hal ini terbukti dengan, keberadaan naskah –naskah melayu di abad XIX secara umum (meskipun ditujukan kepada raja), menyatakan pentingnya etika kedermawanan seperti perilaku bermurah hati, menghormati dan mencintai orang miskin dan anak yatim, menghindari keserakahan, dan berlaku adil (hal. 76-77). Dalam posisi inilah Prof. Azyumardi Azra menyatakan dalam pengantarnya, bahwa filantropi Indonesia memiliki keunikan yang tiada bandingannya di dunia.

Dr. Amelia Fauzia, memberikan gambaran komprehensif dan rinci terkait dengan sejarah filantropi di Indonesia. Sejak zaman Kerajaan, Kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru hingga zaman

Post-Orde Baru. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, praktik berderma sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Ketika banyak kasus memperlihatkan bahwa perkembangan filantropi Islam berhasil karena Negara yang lemah, pada periode ini justru menyajikan sebuah fenomena yang menarik; yaitu kekuatan Negara sangat kuat begitupula perkembangan filantropi semakin pesat. Penyebabnya adalah kebijakan sekuler dan diskriminatif yang diambil oleh Belanda dalam pemerintahannya (hlm.105)

Buku ini secara umum mengungkap tentang kontestasi antara Negara dan masyarakat dalam konteks gerakan berderma. Sepanjang sejarahnya, praktik-praktik berderma diwarnai dengan kontestasi yang seimbang antara Negara dan masyarakat sipil (*civil society*); antara upaya untuk melibatkan Negara dalam mengatur kegiatan berderma dan upaya mempertahankan praktik tersebut pada kendali masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan perubahan sosial yang mengalami 'kebekuan' (hlm. xxxi). Satu hal yang menjadi menarik adalah, ketika negara lemah, gerakan filantropi ini berkembang pesat kemudian digunakan untuk menentang kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat sipil (*civil society*) akan cenderung melemah, akan tetapi tetap saja masih akan menemukan cara untuk menjalankan kegiatan-kegiatan filantropi dalam ruang publik untuk mendorong perubahan sosial. Hal ini terlihat ketika penjajahan Jepang pada tahun 1942-1945 dimana terbentuk sebuah organisasi Majelis A'la Muslimin Indonesia yang berfungsi sebagai penampung gerakan berderma di Indonesia.

Selanjutnya, pesantren beserta para ulama, masjid dan organisasi modern berperan penting untuk menjadi benteng kedermawanan masyarakat. Terdapat dua tipe tradisi kedermawanan yang telah menciptakan dua model masyarakat sipil yang berbeda. *Pertama*, tradisi saling berbagi (*reciprocity*) di lingkungan pedesaan yang berpusat di pesantren, masjid dan ulama' tradisional. *Kedua*, tradisi kederawanan berbasis institusi modern perkotaan yang berpusat di lingkungan organisasi Islam modernis yang di motori oleh Muhammadiyah. Kedua tradisi ini sama-sama memiliki sifat yang independen dari Negara (*walaupun tidak sepenuhnya*) dan bertujuan untuk meng-Islamkan masyarakat, bukan Negara (hal.103).

Pada era pasca orde baru, perkembangan filantropi dari tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan kontestasi 'tarik-menarik'

pengaruh antara Negara dengan masyarakat sipil. Negara menginginkan zakat di kelola oleh Negara (*sentralisasi*), sebaliknya masyarakat menginginkan untuk mereka kelola sendiri (*desentralisasi*) (hal. 259). Pada akhirnya, terdapat kejanggalan dalam gerakan filantropi di Indonesia. Di satu sisi, gerakan ini memperjuangkan kebebasan; dengan *respon* kritis terhadap pemerintah. Di sisi lainnya, gerakan ini berusaha untuk memanfaatkan sistem Negara untuk memaksakan keyakinan agama dalam agenda filantropi (hlm. 269).

Berdasarkan kajian Dr. Amelia ini, layaklah bagi kita untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa kontestasi antara Negara dan masyarakat akan selalu berjalan. Akan tetapi patut untuk dicermati perkataan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa, “Agama dan Negara ibarat dua benteng yang saling menguatkan. Bahkan Negara dapat menegakkan apa yang tidak bisa ditegakkan oleh Agama”.